BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Earnings management muncul karena adanya *agency conflicts*, yang muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan (Sudewi, 2004). Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu prinsipal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pemegang saham dalam menilai prestasi ekonomi yang dicapai oleh perusahaan.

Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenaan yaitu adanya tindakan selarasan kepentingan antara pemilik dan manejemen (Beneish,2001). Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena

mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya (Gumanti, 2000).

Menurut Faisal (2005) struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham dan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahan untuk mengendalikan tindakan manjer (Dallas,2004). Mekanisme tersebut dapat berupa yaitu struktur kepemilikan (kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional), dan pelaksana audit oleh auditor eksternal (Bablc,2001)

Salah satu faktor lain yang mendorong manajemen dalam melakukan *earning management*, seperti yang dinyatakan oleh Scott (2000), yaitu motif kontraktual (didalamnya termasuk *leverage*). Rasio *leverage* dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*) atau dapat juga menunjukan beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Ukuran ini berhubungan dengan keberadaan dan ketat tidaknya persetujuan utang. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah hutang dibandingkan dengan modal atau aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan *earning management* karena perusahaan terancam *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya.

Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan interen yang ada pada akuntansi yang menyebabkan adanya *judgement* (Setiawati, 2002).

Kasus manajemen laba terjadi pada perusahaan PT. Kima Farma Tbk. Pada laporan auditnya Bapepam menemukan adanya indikasi *mark up* terhadap laba dimana tahun 2004 ditulis Rp. 132 milyar padahal sebenarnya hanya senilai Rp. 99,594 milyar. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2004, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMNN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2005 laporan keuangan Kimia Farma 2005 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated

penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2005. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2004. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Kemampuan untuk menemukan kecurangan dari laporan keuangan ditentukan oleh Kompetensi auditor. Akibat adanya manipulasi tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 500 juta kepada PT. Kimia Farma Tbk dan kepada auditornya sebesar Rp. 100 juta (Media Akuntansi, 2004).

Kasus yang sama juga terjadi pada PT. Indofarma Tbk ini diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT. Indofarma Tbk. Yang melatar belakangi kasus PT. Indofarma yaitu karena setelah diadakan pemeriksaan di kantor akuntan terhadap hasil laporan PT. Indofarma untuk tahun buku 2004 yang melaporkan adanya kerugian sebesar 60 milyar. Sedangkan banyak kalangan

yang mengatakan hingga akhir kwartal ketiga tahun 2004, indofarma masih mencatatkan keuntungan sebesar Rp. 86 Milyar.

Sehingga BAPEPAM menemukan indikasi adanya penyembunyian informasi penting menyangkut kerugian selama dua tahun berturut-turut yang diderita PT. Indofarma Tbk. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam Abraham Bastari mengatakan temuan ini terungkap setelah Institusinya memanggil sejumlah pihak, termasuk direksi dan mantan direksi indofarma karena BAPEPAM menduga ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak diungkapkan.

Karena permasalahan inilah maka BAPEPAM meminta kepada TIM untuk secara detail meneliti khususnya yang berkaitan dengan barang-barang yang dihapus, asal-usul dari pembelian barang itu,dan mengawasi apakah pembelian itu karena tindakan kriminal atau salah manajemen.

Bukti – bukti yang di temukan bahwa nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2004 sebesar Rp28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu tinggi (overstated) persediaan sebesar Rp28,87 miliar, harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah (understated) sebesar Rp28,8 miliar dan laba bersih disajikan terlalu tinggi overstated dengan nilai yang sama (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004).

Tanpa banyak gembar-gembor, pemerintah menggusur Edy Pramono dari posisinya sebagai orang nomor satu di Indofarma. Dalam rapat umum pemegang saham Edy digantikan Dani Pratomo. Sebelumnya, Dani menjadi Presiden

Direktur PT Phapros Indonesia. Pergantian ini tidak terlalu mengejutkan karena Edy sudah tahu dia bakal dicopot. Tapi perubahan manajemen ini tetap saja mengundang banyak pertanyaan. Kabar di luar menyebutkan bahwa pemerintah menganggap Edy gagal mengemudikan perusahaan obat yang berkonsentrasi dalam produksi obat generik itu. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu memetik laba, tahun lalu Indofarma rugi Rp 59 miliar. Kerugian ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pernyataan manajemen lama. Sebelum audit dilakukan, manajemen Indofarma menghitung kerugian Indofarma paling-paling Rp 20 miliar. Tapi, setelah audit selesai, kerugiannya justru naik tiga kali lipat. Kondisi ini jelas tidak bagus bagi pemerintah, yang berniat menjual mayoritas sahamnya di Indofarma. Rapor merah ini terang akan mengurangi nilai jual Indofarma, yang banyak diminati perusahaan obat lain. Karena itulah Edy kemudian digusur. Edy sendiri mengelak dituding sebagai penyebab kerugian. Menurut dia, kinerja keuangan Indofarma jeblok setelah subsidi kurs untuk obat generik dihapuskan. Pada saat yang sama, harga obat generik tidak boleh naik. Akibatnya, kinerja keuangan Indofarma buntung. Edy menceritakan, dari subsidi saja, pendapatan Indofarma yang raib mencapai Rp 70 miliar, dan potensi pendapatan yang hilang akibat harga tidak naik malah lebih besar, sampai Rp 110 miliar. Inilah yang kemudian menyebabkan rapor Indofarma merah menyala. Kendati demikian, banyak pihak yang tidak bisa menerima penjelasan Edy. Auditor Watch, lembaga yang mengawasi kerja para akuntan publik, menemukan bahwa biang keladi jebloknya keuangan Indofarma tak lain adalah harga pokok penjualan yang kelewat tinggi. Koordinatornya, Lan Gumay, mengatakan bahwa

pada tahun 2004, dengan penjualan Rp 615 miliar, biaya produksi cuma setengahnya. Tapi, pada tahun lalu, ongkos produksi melonjak menjadi lebih dari dua pertiga pendapatan. "Seharusnya auditornya, Hans Tuannakotta dan Mustofa, memberikan klarifikasi soal ini," kata Lan. Analis bisnis farmasi BNI Sekuritas, Fitri Murniawati, menyodorkan fakta yang sama. Penjualan Indofarma sepanjang tahun 2005 cuma naik 12 persen, sementara ongkos produksi membengkak 82 persen dan biaya pemasaran naik 41 persen. Setelah menelusurinya lebih mendalam, Fitri melihat bahwa pembengkakan biaya terjadi pada Indofarma Global Medika, anak perusahaan Indofarma yang mendistribusikan produk perusahaan induknya. Data perusahaan belum diaudit yang dikutak-katiknya menunjukkan bahwa selama sembilan bulan pertama 2005, beban usaha di anak perusahaan mencapai Rp 39 miliar. Tapi, dalam tiga bulan terakhir, beban usahanya mencapai Rp 31 miliar. Fitri mengakui bahwa tidak mudah menelurusi penyebab pembengkakan ongkos yang begitu drastis di Indofarma Global karena ini bukan perusahaan publik. "Kalau pengeluaran terjadi di induk perusahaan, yang merupakan perusahaan terbuka, mungkin lebih mudah menganalisisnya," kata Fitri. Sebelumnya, Edy pernah menjelaskan bahwa ada kesalahan pencatatan stok di Indofarma Global. Kesalahan ini kemudian menyebabkan Indofarma juga keliru menerapkan strategi pemasaran. Sialnya, Indofarma hanya melakukan pengecekan stok setahun sekali. "Ada selisih pencatatan sampai Rp 57 miliar," kata Edy belum lama ini. Tapi benarkah cuma karena itu? Lan menduga ada dana yang lari ke partai tertentu. Dani kontan membantahnya. Berdasarkan penelusuran terbatas yang dilakukannya, manajemen baru belum menemukan ada indikasi

penyelewengan pendahulunya. Kesalahan direksi lama, kata Dani, adalah terlalu lamban mengantisipasi penghapusan subsidi. Dia mencontohkan Kimia Farma dan Phapros, yang tetap untung kendati subsidi dihapus. Jadi, agaknya langkah pemerintah mengganti Edy sudah tepat. Namun pemerintah sebaiknya tak berhenti di situ. Manajemen lama harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Auditor Indofarma, Hans Tuannakotta & Mustofa (HTM), sudah memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang salah karena sebelumnya manajemen mengklaim kerugian cuma Rp 20 miliar. Sayangnya, Chief Executive Officer HTM, Theodorus Tuannakotta, hanya mengatakan, "Ada yang kami temukan, tapi tak bisa diungkapkan karena bukan informasi publik."

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari kasus yang terjadi pada tahun 2004 di PT. Indofarma, maka penelitian ini diberi judul **" Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Laverage* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan *Laverage* terhadap manajemen laba adalah :

1. Hasil laporan PT. Indofarma untuk tahun buku 2004 yang melaporkan adanya kerugian sebesar 60 milyar. Sedangkan banyak kalangan yang mengatakan hingga akhir kwartal ketiga tahun 2004, indofarma masih mencatatkan keuntungan sebesar Rp. 86 Milyar. Sehingga BAPEPAM

menemukan indikasi adanya penyembunyian informasi penting menyangkut kerugian selama dua tahun berturut-turut yang diderita PT. Indofarma Tbk. Karena permasalahan inilah maka BAPEPAM meminta kepada TIM untuk secara detail meneliti khususnya yang berkaitan dengan barang-barang yang dihapus, asal-usul dari pembelian barang itu,dan mengawasi apakah pembelian itu karena tindakan kriminal atau salah manajemen.

2. Hasil laporan audit Bapepam menemukan adanya indikasi *mark up* terhadap laba PT. Kimia Farma dimana tahun 2004 ditulis Rp. 132 milyar padahal sebenarnya hanya senilai Rp. 99,594 milyar. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2005 laporan keuangan Kimia Farma 2005 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master

prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2005. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2004. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan *Laverage* terhadap manajemen laba adalah :

1. Bagaimana stuktur kepemilikan, *Laverage* dan manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur?
2. Seberapa besar pengaruh struktur kepemilikan dan *Laverage* terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh struktur kepemilikan dan *Laverage* terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur secara simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Laverage* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan *Laverage* terhadap manajemen laba adalah :

1. Untuk mengetahui stuktur kepemilikan, *Laverage* dan manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur.
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan *Laverage* terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi para investor diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan *Laverage*, struktur kepemilikan, khususnya manajemen laba.
2. Bagi pihak manajemen perusahaan, memberikan masukan dalam mencermati perilaku manajemen dalam aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan struktur kepemilikan dan *Laverage*.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Peneliti/Penulis

   Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata Satu sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan dan mendapatkan pengalaman serta mengetahui permasalahan yang terjadi di perusahaan.

2. Bagi Unikom

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat jadwal penelitian yang di mulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci jadwal dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2012				April 2012				Mei 2012				Juni 2012				Juli 2012				Agustus 2012			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :**																								
	a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul Skripsi																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	**Proses Usulan Penelitian:**																								
	a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Proses Penyusunan Skripsi:**																								
	a. BimbinganSkripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								